



Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Yayasan Inspirasi Bangsa menandatangani nota kesepahaman kerja sama atau MOU terkait pemenuhan hak anak didik pemsarakatan

Fakultas Hukum (FH) Universitas Medan Area (UMA) dan Yayasan Inspirasi Bangsa (YIB) menandatangani nota kesepahaman kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemenuhan hak anak didik pemsarakatan (Andik Pas), di Convention Hall Kampus I UMA, Jalan Kolam Medan Estate, Kamis (2/11). MoU itu ditandatangani langsung Dekan FH UMA Dr Utary Maharany Barus SH MHum dan Ketua Umum YIB Wanda Syahputra SH, disaksikan Wakil Rektor (WR) III UMA Bidang Kemahasiswaan Ir Zulheri Noer MP, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU) Hj Nurlela MAP, Kanit Polmas Binmas Polrestabes Medan AKP Gunawan SH, dan Kepala Lembaga Pemsarakatan Khusus Anak (LPKA) Klas I A Medan Sri Bulan S SH MHum.

Wakil Rektor III UMA Zulheri Noer dalam kata sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi dari visi dan misi UMA untuk membangun peradaban bangsa. Tetapi harus ada tindakan-tindakan nyata yang bermanfaat dan kajian-kajian yang langsung menyentuh persoalan-persoalan faktual yang ada di tengah-tengah masyarakat. "Artinya perguruan tinggi tidak cukup hanya terpaku, sehingga mengabaikan terhadap persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat seperti persoalan anak. Program ini tidak hanya mahasiswa yang bisa mengabdikandirinya tetapi juga para dosen melakukan penelitian tentang anak," ujarnya di depan ratusan mahasiswa FH UMA.

Dekan FH UMA Utary Maharany Barus mengatakan, dalam pelaksanaan kerja sama pemenuhan hak-hak Andik Pas ini, FH UMA juga melibatkan dosen, mahasiswa dan Ikatan Alumni Magister Ilmu Hukum UMA. "Kegiatan sangat positif karena akan menjadi ajang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat," kata dekan. Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) diwakili Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hj Nurlela, menyambut baik kerjasama FH UMA dan YIB. Menurutnya, PemprovSU melalui dinas yang dipimpinnnya siap membantu YIB dan UMA untuk memperluas asesmentnya ke kabupaten/kota. "Kita akan fasilitasi YIB dan FH UMA untuk memperluas programnya ke kabupaten/kota," katanya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumut diwakili Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas I A Medan Sri Bulan menjelaskan, lapas anak ini tentu masih banyak persoalan yang perlu dibenahi. Karenanya ia mengapresiasi FH UMA yang telah menginisiasi acara ini. "Mudah-mudahan acara ini akan menghasilkan masukan-masukan yang positif terutama terkait pemenuhan hak-hak anak di dipemasyarakatan," sebutnya. Kegiatan itu juga diisi dengan bincang-bincang dan talk show tentang hak-hak anak baik yang masih menjadi binaan LPKA Anak maupun mantan binaan.

